



Kenaikan Tarif Puskesmas Wajar

Dinkes Yogya Sebut Sesuaikan Kondisi

YOGYA, TRIBUN - Kenaikan tarif pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Yogyakarta diklaim Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat masih wajar.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, dr Fita Yulia Kiswornini MKes, berakalan, kenaikan tarif ini dilaksanakan untuk menyesuaikan tarif lama yang ditentukan pada tahun 2010 silam, untuk mengimbangi tarif kondisi saat ini.

"Semakin lama biaya pengobatan dan pemeriksaan juga terus berkembang, sedangkan tarif yang ada sudah lama sekali, untuk itu penyesuaian tarif ini menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini," ujar Fita, Kamis (3/3).

Fita mengklaim tarif baru yang diterapkan saat ini sudah wajar, penyesuaian tarif sudah melalui banyak pertimbangan, dan diusulkan sejak jauh hari sebelumnya. Ia mengeluhkan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang masih lebih rendah dari tarif parkir, sehingga dikhawatirkan masyarakat kurang menghangai kesehatan.

Alasan lain, ia menuturkan, subsidi yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Puskesmas malah lebih banyak digunakan oleh masyarakat luar Kota Yogyakarta ketimbang masyarakat Yogyakarta sendiri.

"Tarif puskesmas sejak zaman dulu segitu-segitu aja, dengan parkir kendaraan aja mahal parkir. Makanya orang kurang menghangai kesehatan. Selain itu, orang-orang di luar kota yang menggunakan Puskesmas di dalam kota, oleh karena itu subsidi kita malah banyak yang keluar," jelasnya.

Rincian kenaikan tarif layanan meliputi tarif pengobatan dan pemeriksaan yang naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 22.000. Tarif pelayanan nonmedis lain juga mengalami kenaikan.

Di antaranya tarif praktik kerja lapangan, penelitian, pendampingan PKL, studi banding, yang tadinya tak dikenakan tarif, sekarang dikenakan tarif variatif dari Rp 5.000 sampai Rp 300.000.

Non-medis
Sedangkan untuk pelayanan nonmedis lain seperti penggunaan jasa medis, paramedis, pengemudi sampai tarif penggunaan gedung, yang mengalami kenaikan yang variatif atau dikenakan tarif, mulai Rp 5.000 sampai ratusan ribu rupiah.

Fita menuturkan, sejauh ini belum ada klaim atau aduan dari masyarakat terkait perubahan tarif biaya pelayanan dasar. Pasalnya, perubahan tarif ini hanya berlaku untuk masyarakat luar Kota Yogyakarta, sedangkan untuk masyarakat Yogyakarta masih terjangkau Jaminan Kesehatan Dasar (Jamkesda) ataupun BRUS.

"Masyarakat Yogyakarta tidak perlu khawatir karena sudah mempunyai KTP, maka ditanggung oleh Jamkesda," ujar Fita.

Perubahan tarif layanan kesehatan dasar ini bakal diterapkan efektif pada 1 Maret 2016 di seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta. Masyarakat selama mempunyai KTP Kota Yogyakarta, dapat menggunakan layanan kesehatan Puskesmas secara cuma-cuma, termasuk warga pemilik Kartu Menuju Sehat (KMS) diprioritaskan (rtk).

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Kesehatan	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☒ Netral	☒ Biasa
4.	✓ Untuk diketahui	
5.		

Yogyakarta

lg. Tri

Warga Sudah Paham

SEJAK 1 Maret 2016, tarif Puskesmas di Yogyakarta naik dari semula Rp 5.000 menjadi Rp 22.000. Rupanya hal itu tidak mengejutkan sebagian warga Yogyakarta. Andi Riyanto misalnya. Warga Umbulharjo tersebut membayar Rp 22.000 dan tambahan Rp 14.000 sebagai biaya laboratorium di Puskesmas Umbulharjo I di Jalan Veteran Yogyakarta.



Sudah ngeriti kalau naik mulai 1 Maret 2016, sudah lihat pengumuman di Puskesmas.

Andi Riyanto
Warga Umbulharjo

"Sudah ngeriti kalau naik mulai 1 Maret 2016, sudah lihat pengumuman di Puskesmas," ujar Andi saat ditemui *Tribun Jogja*, Kamis (3/3). Walaupun terdaftar sebagai anggota BPJS, namun Andi tetap membayar karena Puskesmas Umbulharjo bukan fasilitas kesehatan pertama rujukannya. Sedang, Lai Lia, warga Kebrokan Umbulharjo tidak mem-

bayar karena ia menggunakan KTP Yogyakarta. "Saya tidak bayar, hanya menunjukkan KTP," tutur Lia.

Staf Puskesmas Umbulharjo II membenarkan sudah mensosialisasikan ke masyarakat sejak lama. "Sudah kami pasang pengumuman sejak pertengahan bulan Februari," tutur staf tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru, menuturkan, kenaikan tarif biaya pelayanan dasar di Puskesmas tak perlu dipermasalahkan, pasalnya tarif naik hanya berlaku untuk warga yang non-KTP Yogyakarta, sedangkan warga Kota Yogyakarta tetap ditampung Jamkesda. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005